

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)



**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dapat diselesaikan.

LKPJ ini disusun untuk memberikan gambaran keadaan dan informasi kinerja atas program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan serta menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Semoga Laporan ini memberikan informasi yang diharapkan oleh *stakeholder* tentang pencapaian kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan LKPJ ini, diucapkan terima kasih.

Benteng, Januari 2022

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Kepulauan Selayar,

**Ir. Makkawaru**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19630120 198910 1 003

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Gambaran Umum .....	1
1.2.    Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD .....	4
1.3.    Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Strukturan .....	13
<b>BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
2.1.    Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	16
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	16
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama .....	37
2.1.3. Capaian kinerja Berdasarkan Urusan .....	38
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .....	39
2.1.5. Inovasi .....	39
2.1.6. Prestasi/Penghargaan	
2.2.    Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan keputusan Bupati) .....	41
2.3.    Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap Bupati Tahun 2021 .....	41
<b>BAB III. PENUTUP</b>	
Penutup .....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Gambaran Umum**

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi 5°42' – 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' – 122°30' Bujur Timur. Bentang wilayah tersebut mencapai luas 10.503,69 km<sup>2</sup> dimana luas wilayah perairan lautnya sekitar 9.146,66 km<sup>2</sup> atau sekitar 87,08% dari total luas kabupaten. Wilayah perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki keanekaragaman hayati kelautan dan perikanan yang melimpah dengan keberadaan ekosistem pesisir yang lengkap dan sumberdaya perikanan yang tinggi. Sehingga memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan dengan gugus pulau sebanyak 130 buah pulau dan panjang garis pantai sekitar 670 km.

Letak dan posisi geografis tersebut telah menempatkan Kepulauan Selayar berada di tengah-tengah Indonesia sehingga menempati posisi strategis dalam konektivitas pembangunan nasional karena merupakan pintu gerbang dan jembatan ekonomi yang menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI, terutama jalur penghubung (hub) distribusi arus barang dan jasa.

Posisi strategis Kabupaten Kepulauan Selayar ini disertai dengan keanekaragaman potensi yang mendukung sektor kelautan dan perikanan dalam Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) 713 dan berada tepat dalam fishing ground Selat Makassar dan Laut Flores. Berbagai komoditas penting kelautan dan

perikanan banyak ditemukan di perairan Kepulauan Selayar seperti ikan pelagis besar dan kecil (tuna, tongkol, cakalang, layang, teri, cumi-cumi, dll), ikan demersal (kerapu, sunu, dll), dan mollusca (lobster, udang, teripang, dll) yang didukung oleh keragaman ekosistem pesisir lengkap yaitu terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem mangrove.

Selain itu, perairan Kepulauan Selayar juga sangat berkontribusi terhadap penyebaran larva ikan dan plasma nutfah bagi kawasan perairan lainnya di Indonesia karena menjadi salah satu jalur utama lintasan Arus Laut Indonesia (Arlindo). Untuk menjaga potensi nasional tersebut, Kepulauan Selayar telah ditetapkan sebagai “Cagar Biosfir Dunia” dengan keberadaan berbagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang tidak tanggung-tanggung mulai Taman Nasional Laut (TNL) Takabonerate seluas 530.760 ha, KKPD Pulo Kauna Kayuadi (status pencadangan) seluas 3.983 ha, KKPD Pulo Pasi Gusung (status pencadangan) seluas 5.018 ha, dan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di 60 lokasi pada 52 desa seluas 545.655 ha.

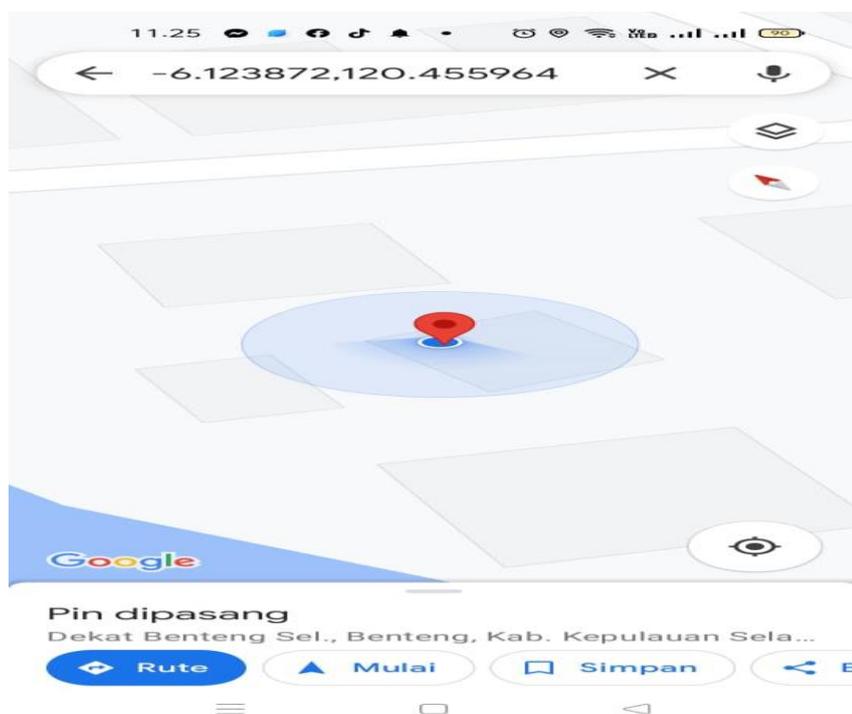
Olehnya itu pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar dijadikan sebagai sektor prioritas yang diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal dan kawasan sekitarnya karena tingginya potensi yang dimiliki (SDA dan kawasan) maupun banyaknya masyarakat (lokal dan sekitarnya) yang bergantung pada kemajuan pembangunan sektor tersebut.

1.1.1. Dinas Perikanan beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kompleks TPI Bonehalan, dengan Email [dkpselayar@yahoo.co.id](mailto:dkpselayar@yahoo.co.id)

Foto Kantor



1.1.2. Titik koordinat Dinas Perikanan adalah 6.123872,120.455964



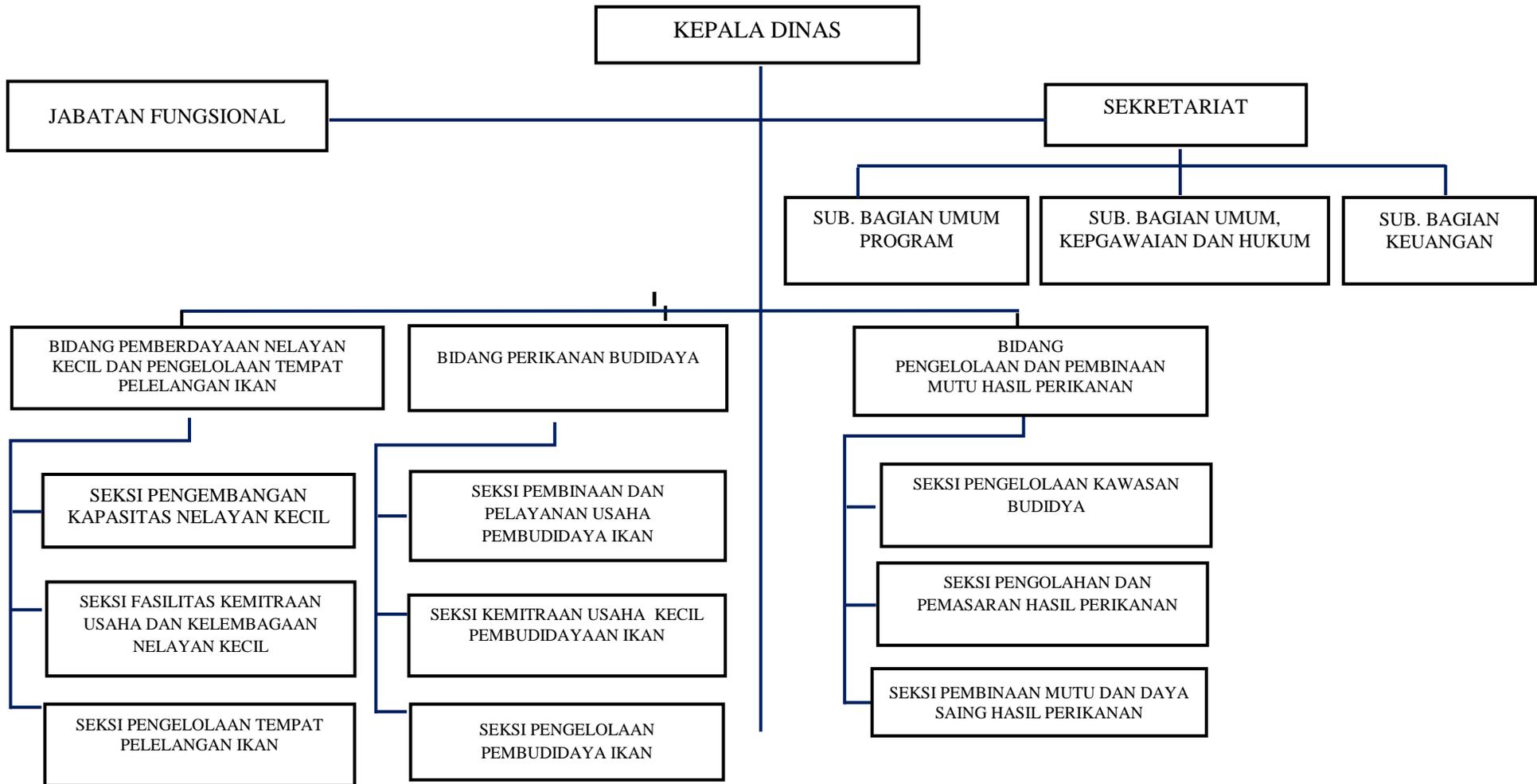
## **1.2 . Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD**

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perikanan. Adapun dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
3. Melaksanakan fungsi administrasi di lingkup Dinas Perikanan.
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



### **1.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 11 Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, struktur organisasi Dinas Perikanan adalah :

I. Kepala Dinas

II. Sekretariat, meliputi :

1. Sub Bagian Program.
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum.

III. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, meliputi

1. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil.
3. Seksi Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

IV. Bidang Pemberdayaan Usaha kecil Pembudidayaan ikan, meliputi :

1. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pembudi Daya Ikan.
2. Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

V. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, meliputi :

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
2. Seksi Pembinaan Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan

VI. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organ adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Secara umum Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- menyusun rencana kegiatan Dinas Perikanan sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- mendistribusikan dan bontro petunjuk pelaksanaan tugas.
- menyelenggarakan administrasi Dinas Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, dan
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 7ontrol saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

## II. Sekretariat

Sekretariat adalah 7ontrol pelayanan teknis administrasi di lingkungan Dinas Perikanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis serta pelayanan administrasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas.
- pengoordinasian penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi keuangan.
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD).
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

- pengoordinasian urusan pengelolaan pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah
- pengoordinasian urusan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- pengoordinasian urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### III. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI

Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas pokok :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dalam lingkup kewenangan kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi

perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.

- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dalam daerah kabupaten.
- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Fasilitasi kemitraan Usaha dan kelembagaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten.
- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- mendistribusikan dan 9ontro pentunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dan 9ontro saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### IV. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok :

- menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya dalam lingkup kewenangan kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pelayanan pendaftaran usaha pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- melakukan kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil.
- melakukan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- Melakukan pembinaan usaha pembudidayaan ikan kecil.
- melakukan pengawasan usaha pembudidayaan ikan yang dapat diusahakan dalam kabupaten.
- mendistribusikan dan 10ontro petunjuk pelaksanaan tugas.
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.

- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan 11 ontro saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### V. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan dalam lingkup kewenangan kabupaten.

- melaksanakan penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.
- melaksanakan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
- melaksanakan fasilitasi bahan verifikasi dan kajian untuk pelayanan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil.
- mendistribusikan dan 12ontro petunjuk pelaksanaan tugas.
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang 12ontro saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan

UPT Dinas adalah 13 pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyediaan bahan pembinaan dan koordinasi kegiatan bina usaha hasil produksi perikanan.

**1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.**

Tabel. 1

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan status kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	Pegawai Negeri Sipil	19	17	37
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0
3	Pegawai Tidak Tetap	27	35	62
	<b>Jumlah</b>	46	52	99

Tabel. 2  
Jumlah PNS Dinas Perikanan berdasarkan tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	S2	1	3	4
4	S1	15	13	28
3	D3	3	1	4
4	D2	0	0	0
5	D1/SLTA	1	0	1
	Jumlah	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>

Tabel. 3  
Jumlah PNS Perikanan berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOL	JUMLAH	
			L	P
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-
2	Pembina Tk.I	IV/b	-	-
3	Pembina	IV/a	1	3
4	Penata Tk. I	III/d	3	3
5	Penata	III/c	5	4
6	Penata Muda Tk.I	III/b	4	1
7	Penata Muda	III/a	3	9
8	Pengatur Tk.I	II/d	-	-
9	Pengatur	II/c	-	-
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-

*Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar*

11	Pengatur Muda	II/a	-	-
	Jumlah		<b>17</b>	<b>20</b>

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DKP Kab. Kepulauan Selayar per-Desember 2022.*

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dan instansi lainnya.

**BAB II**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada Tahun 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.628.129.359,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) yang mencakup 4 Program yang terdiri dari 18 kegiatan dan 57 Sub. Kegiatan Berikut ini program dan kegiatan bidang Perikanan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas :

**2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

<b>N O</b>	<b>URUSAN PEMERIN TAHAN</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>URAIAN PROGRAN/KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>UPAYA MENGATASI PERMASALAHA N</b>	<b>TINDAK LANJUT REKOMENDAS I DPRD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
				<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
1	Perikanan	Dinas Perikanan			<b>Alokasi Anggaran Rp.5.584.485.334,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.5.448.586.810,-</b>			
				<b>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	3 Dokumen	3 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp. 291.613.750,-	Realisasi Anggaran Rp. 288.585.250,-			
				- Sub. Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Rp. 99.209.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 98.758.000,-			

Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

				- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 6.428.700,-	Realisasi Anggaran Rp. 6.408.700,-			
				- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 5.641.950,-	Realisasi Anggaran Rp. 5.231.950,-			
				- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 5.073.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 4.983.000,-			
				- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 5.087.500,-	Realisasi Anggaran Rp. 4.886.000,-			
				- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 10.403.300,-	Realisasi Anggaran Rp. 8.633.300,-			
				- Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Rp. 159.770.300,-	Realisasi Anggaran Rp. 159.684.300,-			
				<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 3.024.648.900,-</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 2.992.599.147,-</b>			
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan Alokasi Anggaran Rp. 2.997.498.000,-	12 Bulan Realisasi Anggaran Rp. 2.965.458.247,-	Sesuai Jumlah Pegawai		
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan Alokasi Anggaran Rp. 10.000.150,-	12 Bulan Realisasi Anggaran Rp. 10.000.150,-	-		
				- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Alokasi Anggaran Rp. 8.198.700,-	1 Laporan Realisasi Anggaran Rp. 8.198.700,-	-		
				- Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen Alokasi Anggaran Rp. 3.842.550,-	1 Dokumen Realisasi Anggaran Rp. 3.842.550,-	-		
				- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 2.354.000,-	Alokasi Anggaran Rp. 2.344.000,-			

Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

				- Sub. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran Rp. 2.755.500,-	Alokasi Anggaran Rp. 2.755.500,-			
				<b>3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 9.807.200,-</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 9.807.200,-</b>			
				- Sub Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 2.737.300,-	Alokasi Anggaran Rp. 2.737.300,-			
				- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 2.420.000,-	Alokasi Anggaran Rp. 2.420.000,-			
				- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 4.649.900,-	Alokasi Anggaran Rp. 4.649.900,-			
				<b>4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 11.180.650,-</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 8.230.650,-</b>			
				- Perencanaan Pengelolaan Retribu Daerah	Alokasi Anggaran Rp. 5.000.000,-	Alokasi Anggaran Rp. 2.050.000,-			
				- Pengolahan Data Retribusi Daerah	Alokasi Anggaran Rp. 6.180.650,-	Alokasi Anggaran Rp. 6.180.650,-			
				<b>5. Kegiatan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.218.572.200,-</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.199.276.200,-</b>			
				- Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Alokasi Anggaran Rp. 50.492.000,-	Alokasi Anggaran Rp. 50.492.000,-			
				- Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Alokasi Anggaran Rp. 0,-	Alokasi Anggaran Rp. 0,-			
				<b>6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 315.581.500,-</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 314.581.500,-</b>			
				- Sub. Penyediaan Komponen Instalasi	Alokasi Anggaran Rp. 2.200.000,-	Alokasi Anggaran Rp. 2.200.000,-			

Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

				Listrik /Penerangan Bangunan Kantor					
				- Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alokasi Anggaran Rp. 3.300.000,-	Alokasi Anggaran Rp. 3.300.000,-			
				- Sub. Pedyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Alokasi Anggaran Rp. 8.687.500,-	Alokasi Anggaran Rp. 7.687.500,-			
				- Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Alokasi Anggaran Rp. 7.800.000,-	Alokasi Anggaran Rp. 7.800.000,-			
				- Sub. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Alokasi Anggaran Rp. 293.594.000,-	Alokasi Anggaran Rp. 293.594.000,-			
				<b>7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 13.870.000,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp. 13.870.000,-</b>			
				- Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alokasi Anggaran Rp. 13.870.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 13.870.000,-			
				- Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Alokasi Anggaran Rp. 0,-	Realisasi Anggaran Rp. 0,-			
				<b>8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 415.213.847,-</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 413.967.547,-</b>			
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Alokasi Anggaran Rp. 6.773.800,-	Realisasi Anggaran Rp. 6.773.800,-	-		
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	6 Jenis Alokasi Anggaran Rp. 108.204.847,-	6 Jenis Realisasi Anggaran Rp. 106.959.347,-	-		
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan Alokasi Anggaran Rp. 300.235.200,-	12 Bulan Realisasi Anggaran Rp. 300.235.200,-	-		
				<b>9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 188.404.677,-</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 138.647.677,-</b>			
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Alokasi Anggaran Rp. 38.630.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 38.630.000,-	-		

Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan					
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Alokasi Anggaran Rp. 51.671.379,-	Realisasi Anggaran Rp. 51.671.379,-			
				- Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alokasi Anggaran Rp. 53.031.298	Alokasi Anggaran Rp. 3.274.298			
				- Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alokasi Anggaran Rp. 45.072.000	Alokasi Anggaran Rp. 45.072.000			
				<b>II. Program pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	Alokasi Anggaran Rp. 4.453.673.405,-	Realisasi Anggaran Rp. 4.109.014.874,-			
				<b>1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusaakan dalam satu daera Kabupaten/Kota</b>	Alokasi Anggaran Rp. 46.719.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 46.522.600,-			
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Alokasi Anggaran Rp. 46.719.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 46.522.600,-			
				<b>2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Alokasi Anggaran Rp. 3.969.166.405	Alokasi Anggaran Rp. 3.648.544.076			
				- Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Alokasi Anggaran 3.762.263.405	Alokasi Anggaran 3.444.174.363			
				- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Alokasi Anggaran Rp. 58.595.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 58.273.000,-			

Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

				- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemtraan Usaha	Alokasi Anggaran Rp. 148.308.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 146.096.713,-			
				<b>3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	Alokasi Anggaran Rp. 437.788.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 413.948.198,-			
				- Sub. Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Alokasi Anggaran Rp. 7.973.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 6.753.000,-			
				- Sub. Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Alokasi Anggaran Rp. 429.815.000	Alokasi Anggaran Rp. 407.195.198	-		
				<b>III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	Alokasi Anggaran Rp. 1.226.301.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 1.179.089.000,-	-	-	
				<b>1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	Alokasi Anggaran Rp. 215.400.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 171.729.900,-	-	-	
				- Sub. Kegiatan Penetapan dan Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan Serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Alokasi Anggaran Rp. 9.695.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 9.695.000,-		-	
				- Sub. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidaya Ikan yang Usahanya,	Alokasi Anggaran Rp. 14.813.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 14.748.000,-		-	

Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

				Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing					
				- Sub. Kegiatan Pengembangan Pembudidaya Ikan Kecil	Alokasi Anggaran Rp. 31.550.000	Alokasi Anggaran Rp. 31.550.000			
				- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Alokasi Anggaran Rp. 26.880.000	Alokasi Anggaran Rp. 26.847.000			
				- Sub. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 16.505.000	Alokasi Anggaran Rp. 16.500.000			
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 62.938.000	Alokasi Anggaran Rp. 62.936.600			
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 100.000.000	Alokasi Anggaran Rp. 100.000.000			
				- Sub. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 448.295.240	Alokasi Anggaran Rp. 446.935.240			

Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

				<b>IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Alokasi Anggaran Rp. <b>1.005.479.740,-</b>	Realisasi Anggaran Rp. <b>899.759.292,-</b>	-	-	
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengelohan Hasil Perikanan dalam 1 ( satu ) Daerah / Kabupaten	Alokasi Anggaran Rp. 37.575.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 37.440.000,-	-	-	
				- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Alokasi Anggaran Rp. 84.688.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 81.703.000,-			
				- Sub. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota	Alokasi Anggaran Rp. 765.138.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 687.389.000,-	-	-	
				- Sub. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 orang Alokasi Anggaran Rp. 113.511.000,-	60 orang Realisasi Anggaran Rp. 113.355.400,-			

Berikut ini program dan kegiatan Dinas Perikanan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
  - a. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - e. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  - f. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. *Kegiatan Administrasi Perangkat Keuangan Daerah*
  - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - d. Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- e. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - f. Sub. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD*
- a. Sub. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - c. Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. *Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*
- a. Sub. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribu Daerah
  - b. Sub. Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah
5. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- a. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - b. Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - e. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - b. Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
8. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
  - c. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan
  - b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

1. *Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daera Kabupaten/Kota*
  - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
2. *Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota*
  - a. Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
  - b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
  - c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemtraan Usaha
3. *Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*
  - a. Sub. Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
  - b. Sub. Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

## **III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

1. *Kegiatan Penertiban Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidaya Ikan yang Usaha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
  - a. Sub. Kegiatan Penetapan dan Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya

- dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan Serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
- b. Sub. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Tekonologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
2. *Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan*
- a. Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
- b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
3. *Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TKPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.*
- a. Sub. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. *Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan*
- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

- c. Sub. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- e. Sub. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

#### **IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

1. *Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*
  - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 ( satu ) Daerah / Kabupaten
2. *Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*
  - a. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3. *Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
  - a. Sub. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota
  - b. Sub. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Adapun realisasi kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

<b>N O</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	4.320.812.524	4.230.780.971	90.031.553	97.91
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.453.673.405	4.109.014.874	344.658.531	92.26
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	848.163.690	782.985.740	65.177.950	92.32
4	Pengolahan dan Pemasaran	1.005.479.740	899.759.292	105.720.448	89.49
<b>JUMLAH</b>		<b>10.924.274.435</b>	<b>10.628.129.359</b>	<b>10.022.540.785</b>	<b>94.30</b>

Uraian dari realisasi kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah**

Capaian keberhasilan kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp **291.613.750,-** Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. **288.585.250,-** atau **98.96%**. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu 100%.

- a. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.209.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 98.758.000,- atau sebesar 99.55%.
- b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.428.700,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.428.700,- atau sebesar 99.69%.
- c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.641.950,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 5.231.950,- atau sebesar 92.73%
- d. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.073.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 4.983.000,- atau sebesar 98.23%
- e. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.087.500,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 4.886.000,- atau sebesar 96.04%.
- f. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.403.300,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 8.633.300,- atau sebesar 82.99%
- g. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.770.300,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 159.684.300,- atau sebesar 99.95%.

## **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **3.024.648.900,-** Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. **2.992.599.147,-** atau **98.94%**. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Keterpenuhan Dokumen Adminstrai Keuangan Perangkat Daerah 100%.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.997.498.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.965.458.247,- atau sebesar 98.93%.
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.150,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 10.000.150,- atau sebesar 100%.
- c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.198.700,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 8.198.700,- atau sebesar 100%.
- d. Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.842.550,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.842.550,- atau sebesar 100%.
- e. Sub. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.354.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.344.000,- atau sebesar 99.58%.
- f. Sub. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.755.500,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.755.500,- atau sebesar 100%

**3. Kegiatan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Kegiatan *Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.807.200,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 9.807.200,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Keterpenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1 Dokumen.

- a. Sub. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.737.300,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.737.300,- atau 100%.

- b. Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.420.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.420.000,- atau 100%
- c. Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.649.900,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 4.649.900,- atau 100%

#### **4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah**

Kegiatan Administrasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.180.650,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 8.230.650,- atau 73.63%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah.

- a. Sub. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribu Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.050.000,- atau 41%.
- b. Sub. Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.180.650,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.180.650,- atau 100%

#### **5. Pengadaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.492.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 50.492.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah 100.

- a. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.492.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 50.492.000,- atau sebesar 100%.

- b. Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 0,- atau sebesar 0%

**6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.581.500,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 314.581.500,- atau 99.68%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 12 bulan.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.200.000,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.300.000,- atau sebesar 100%
- c. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.687.500,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 7.687.500,- atau sebesar 88.49%

**7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.870.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 13.870.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100.

- a. Sub. Kegiatan Pengadaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.870.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 13.870.000,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 0,- atau sebesar 0%

**8. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 415.213.847,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 413.967.547,- atau 99.70%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Keterpenuhihan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 100%.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.773.800,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.773.800,- atau sebesar 100%.
- d. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.204.847,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 106.959.347,- atau sebesar 98.85%
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.235.200,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 300.234.400,- atau sebesar 100%

**9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.404.677,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 138.647.677,- atau 73.56%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100%.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.630.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 38.630.000,- atau sebesar 100%
- c. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.671.379,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 51.671.379,- atau sebesar 100%

- d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.031.298,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.274.298,- atau sebesar 6.17%.
- e. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.072.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 45.072.000,- atau sebesar 100%

## II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Capaian keberhasilan kegiatan dalam Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. *Kegiatan Pengelolaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*

*Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota* mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.719.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 46.522.600,- atau 99.58%. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan yang dapat diusahakan dalam daerah kabupaten 4 Dok.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.719.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 46.522.600,- , - atau sebesar 99.58%.
- b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembetulan dan Pembangunan Kelembagaan Nelayan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.919.500,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 157.643.200,- atau sebesar 87.13%. Kegiatan ini

tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya sisa perjalanan dinas (Biaya penginapan untuk kepulauan karena yang terpakai hanya 30 persen)

- c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Keitraan Usaha mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.013.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 59.600.000,- atau sebesar 87.63%. Kegiatan ini tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya sisa perjalanan dinas luar daerah.

## **2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten Kota**

Kegiatan *Kegiatan* Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.969.166.405,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.648.544.076,- atau 91.92%. Keluaran kegiatan ini adalah Capaian Bina Kelompok Nelayan (KUB) 100% dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Cakupan Bina Kelompok Nelayan 9696.07 Ton.

- a. Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.762.263.405,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.444.174.363,- atau sebesar 91.55%
- b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.595.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 58.273.000,- atau sebesar 99.45%
- c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemtraan Usaha mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.308.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 146.096.713,- atau sebesar 98.51%.

**3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 437.788.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 413.948.198,- atau 94.55%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TP) dan Sentra Pendaratan yang Operasional 2 unit dan Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra Pendaratan yang Operasional dan Terkelola 1 unit TPI.

- a. Sub. Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.973.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.753.000,- atau sebesar 98.51%.
- b. Sub. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 429.815.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 407.195.198,- atau sebesar 94.74%.

**III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

**1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya danlam 1 (satu) Daerah Kabupate/Kota**

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya danlam 1 (satu) Daerah Kabupate/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.508.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 24.443.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan untuk pengurusan iizin usaha perikanan 3 rekomendasi.

- a. Sub. Kegiatan Penetapan dan Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan Serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.695.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 9.695.000,- atau sebesar 100%.

- b. Sub. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Tekonologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.813.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 14.748.000,- atau sebesar 99.56.

## **2. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**

Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.430.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 58.397.000,- atau 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok yang Diberdayakan sebanyak 4 Kelompok.

- a. Sub. Kegiatan Pengembangan Pembudidaya Ikan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.550.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 31.550.000,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Keci mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.880.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 26.847.000,- atau sebesar 99.88%.

## **3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.505.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 16.500.000,- atau 99.97%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan untuk pengurusan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil sebanyak 25 rek TDP.

- a. Sub. Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 0,- atau sebesar 0%.
- b. Sub. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.505.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 16.500.000 atau sebesar 99.97%.

**4. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.720.690,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 683.645.740,- atau 91.31%. Keluaran kegiatan ini adalah Cakupan Bina kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebanyak 6 Kelompok.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.938.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 62.936.600,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 100.000.000,- atau sebesar 100%.
- c. Sub. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 448.295.240,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 446.935.240,- atau sebesar 99.70%.
- d. Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.778.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 19.778.000,- atau sebesar 100%

#### **IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

##### **1. Kegiatan Penerbitan Tanda Datar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**

Kegiatan Penerbitan Tanda Datar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.575.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 37.440.000,- atau 99.64%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah rekomendasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan sebanyak 2 Dokumen.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 ( satu ) Daerah / Kabupaten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.575.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 37.440.000,- atau sebesar 99.64%.

##### **2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.688.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 81.703.000,- atau 96.48%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro yang mendapatkan Pembinaan sebanyak 50 Orang.

- a. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.688.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 81.703.000,- atau sebesar 96.48%

**3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 883.216.740,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 780.616.200,- atau 88.38%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Ikan yang dipasarkan Ke Luar Daerah sebanyak 169.02 Ton.

- a. Sub. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.138.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 687.389.000,- atau sebesar 89.84%.
- b. Sub. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.511.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 113.355.400,- atau sebesar 99.86%.

**2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>N O</b>	<b>URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	%	65-70	56,44		
2	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)	Skala Predikat	Sangat Tinggi	na		
3	Berkurangnya Jumlah Rumah Tangga Miskin Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	KK	241	na		
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Pembudidaya (NTPi)	Skor	≥ 103	NTN : 107,43 NTPi : 101,90		
5	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	Rp. Juta	Rp. 1.130.295,3	1.659.516,80		
6	Realisasi Pembangunan Sentra Kawasan Industri Perikanan Terpadu	%	65			
7	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	36.938,08	20. 883.8	56.53	

*Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar*

8	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	961,13	522,79	54.39	
9	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	135			
10	Konsumsi Ikan	Kg/org/Tahun	53	69.1		
11	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan (yang diberibantuan Tahun 2021)	Kelompok	190			

**2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN**

<b>N O</b>	<b>URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>KETERANGA N</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=(5/4)*100</b>	<b>7</b>
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	36.938,08	20. 883.8	56.53	
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	961,13	522,79	54.39	

**2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DI  
TETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA**

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perikanan	10.924.274.435,00	10.529.887.709,00	394.386.726,00	96.32	4	98.54	13	96.32

**2.1.5. INOVASI**

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/MANFAAT	KET
1	2	3	4	5
1	Pembuatan Pupuk Cair dari Rumput Laut Selayar	Meningkatnya Pengetahuan Pembudidaya tentang Pemanfaatan Rumput Laut <i>Glacilaria SP, Lilia SP, dan Sargassum</i> melalui pembuatan pupuk cair dari rumput laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertambahnya Ilmu Pengetahuan Staf Dinas Perikanan tentang berbagai Jenis Alga (Rumput Laut) yang ada di Selayar.</li> <li>- Bertambahnya Keterampilan</li> </ul>	

			Pembudidaya mengenai Pembuatan Pupuk Cair dari Rumput Laut dan menciptakan mata pencaharian alternatif bagi pembudidaya.	
--	--	--	--	--

**2.1.6. PRESTATI/PENGHARGAAN**

No	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8

**2.2. KEBIKANAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2021**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Ket
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	Rencana Strategis Perangkat Daerah	107/24 September 2021	Rencana Strategis Perangkat Daerah		

**2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalh Yang Diselesaikan
1	2	3	4

### **BAB III PENUTUP**

Laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas atas program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi diantaranya adalah kegiatan : (a). Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (b). Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pemetukan dan Pembangunan Kelembagaan Nelayan Kecil (c). Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Keitraan Usaha (d). Sub. Kegiatan Pelayan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (e). Sub. Kegiatan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja.